

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia, pada era reformasi ini dititik beratkan pada pembangunan ekonomian kerakyatan, artinya pembangunan ekonomi yang keberpihakan kepada rakyat. Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpuk di pedesaan, hal tersebut menurut penyusun sangat tepat, mengingat adanya dukungan yang kuat dari potensi sumber daya alam yang tersedia yang dapat meningkatkan nilai tambahnya antara lain melalui kegiatan industri, khususnya pemberdayaan industri kecil yang selama ini belum memanfaatkan secara optimal, demikian pula tenaga kerja yang ada diperdesaan secara kuantitatif sangat potensial, walaupun secara kualitatif masih memerlukan peningkatan.

Mengenai pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana digaris kan dalam GBHN 1999-2004 (Garis-Garis Besar Haluan Negara) berikut :

“Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat”.

Jelaslah pembangunan bidang ekonomi, dititik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia untuk memiliki daya saing yang sehat dalam pasar global. Sedangkan industri menurut definisinya yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1984, tentang Perindustrian adalah sebagai berikut

“Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi termasuk rekayasa dan rancang bangun “.

Definisi industri tersebut, menunjukkan bahwa pembangunan industri adalah pembangunan ekonomi yang mengolah potensi yang tersedia dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai guna dari bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Artinya pembangunan industri adalah berarti membangun ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan nilai guna dari potensi yang tersedia, baik yang ada di pedesaan maupun yang ada diperkotaan. Dengan pembangunan industri di Indonesia, bukan saja dapat meningkatkan ekonomi yang bersumber dari hasil pertanian dalam arti luas, akan tetapi dari berbagai sektor lainnya, seperti dari pertambangan dari bahan baku buatan lainnya, yang selanjutnya selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri akan tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri melalui kemampuan bersaing di pasaran internasional yang selanjutnya berdampak pada peningkatan devisa negara.

Untuk mendorong perekonomian rakyat pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan sebagaimana digariskan dalam GBHN (1999-2004) sebagai berikut:

“Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.”

Kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam GBHN, terlihat bahwa industri kecil dan menengah mendapat perhatian untuk ditumbuhkembangkan agar memiliki daya saing dipasaran, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian peluang usaha yang seluas-luasnya, dan diberikan bantuan fasilitas lainnya melalui perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan latihan, informasi bisnis dan teknologi serta permodalan dan lokasi berusaha yang pada umumnya tidak dibatasi, kecuali untuk industri tertentu yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Namun demikian pembangunan industri pada jaman manapun memiliki tuntutan adanya perubahan ke arah modernisasi. Tuntutan yang mengarah modernisasi termaksud diperlukan pelatihan yang harus dilakukan secara profesional. Sedangkan untuk melaksanakan pelatihan yang profesional tentunya tidak terlepas dari kegiatan manajemen

pelatihannya. Dengan pelaksanaan pelatihan yang menggunakan manajemen yang baik akan mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Apabila pelatihan dapat mencapai sasarannya, maka pemberdayaan industri kecil diperkirakan akan tercapai dan apabila pemberdayaan industri kecil tercapai, maka akan mendorong perwujudan ekonomi kerakyatan. Mengenai kaitan antara bidang pembangunan ekonomi kerakyatan dengan keberadaan industri kecil, akan terlihat sekali adanya hubungan yang erat, seperti dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha dan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun untuk bersaing pada pasar global.

Keberadaan industri kecil yang berdasarkan laporan Dinas Perindustrian Jawa Barat dari jumlah 253.452 unit usaha industri, sebanyak 248.890 atau sebanyak (98,2%) diserap oleh industri kecil, Penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.363.000 orang diserap oleh industri kecil sebanyak 1.472.149 orang atau sebesar (62,3%), sedangkan investasi sebesar Rp. 23.487.655,86 diserap oleh industri kecil sebesar Rp. 539.146,51 juta atau sebesar (2,3%). Dengan data tersebut terlihat bahwa industri kecil merupakan industri padat karya, karena banyak melibatkan tenaga kerja walaupun investasi yang terbatas.

Penyebaran industri kecil yang menyebar sampai ke pelosok pedesaan berarti industri kecil memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi di pedesaan. Akan tetapi industri kecil pada umumnya, selain memiliki potensi yang besar secara kuantitatif, namun secara kualitatif masih menghadapi permasalahan antara lain manajemen usaha yang belum diterapkan, sehingga berakibat usahanya berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi lapangan, yaitu: (a) tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita, (b) tidak/ kurang memperhatikan perhitungan biaya produksi, sehingga tidak mengetahui harga pokok, (c) Tenaga kerja kurang memperhatikan tenaga terampil/ profesional akan tetapi lebih mengutamakan saudaranya, tetangganya atau teman dekatnya, (d) Produk tidak diproduksi berdasarkan kebutuhan konsumen, akan tetapi berdasarkan kebiasaan memproduksi, (e) kurang melakukan evaluasi baik terhadap keberhasilan usaha, maupun kegagalan usahanya; dan (f) tidak melakukan pencatatan usaha.

Apabila keadaan tersebut dibiarkan, maka industri kecil tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga tidak akan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai yang diharapkan. Perlu diketahui pula bahwa industri kecil pada umumnya tidak melakukan manajemen usaha diantaranya adalah tidak memiliki pengetahuan manajemen usaha, mereka berusaha apa adanya dan turun

menurun atau ikut-ikutan, sehubungan dengan hal tersebut industri kecil perlu diberikan pelatihan manajemen usaha yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Termasuk didalamnya memberikan metoda pelatihan yang tepat, sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya yang mereka miliki. Karena dengan memberikan pelatihan yang tepat materi, tepat waktu, tepat metode, maka pelatihan itu akan dapat dimengerti dan diterima serta selanjutnya dapat dilaksanakan dalam menjalankan usahanya. Artinya industri kecil akan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Hal itu tentunya baru akan terealisasi apabila pelatihan terhadap industri diterapkan dengan menggunakan manajemen pelatihan yang baik.

Sehubungan dengan uraian di atas, berarti manajemen pelatihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelatihan itu sendiri. Dengan diterapkannya manajemen pelatihan pada setiap kegiatan pelatihan usaha industri kecil, maka pelatihan dapat mencapai sasarannya, yaitu mampu untuk dimengerti, diserap dan diterapkan oleh para peserta dalam menjalankan usahanya. Untuk memperjelas, pada kesempatan ini dikutip pendapat Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (1996: 1) mengemukakan sebagai berikut :

“Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui

cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas, dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.”

Dengan demikian apabila pelatihan tidak dilandasi dengan manajemen pelatihan, maka pelatihan sulit atau tidak akan mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dilain pihak pelatihan itu sangat diperlukan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan usaha baik dalam hal manajemen usaha maupun dalam penumbuhan jiwa wirausaha serta keterampilan dalam hal teknologinya yang belum tumbuh dan berkembang. Adapun mengenai jiwa kewirausahaan dengan penerapan manajemen itu adalah sangatlah erat kaitannya. Seperti belum berkembangnya Jiwa wirausaha industri kecil dapat diketahui dari beberapa ciri antara lain; tidak percaya diri dan masih banyak yang berjiwa spekulatif, kendornya motivasi berusaha, cepat puas apabila kebutuhan telah terpenuhi walaupun waktu masih ada, prustasi apabila sekali gagal, tidak memperhatikan management usaha, masih rendahnya tingkat pendidikan, orientasi kepada pasar masih sangat rendah, dan keterbatasan modal. Hal tersebut mengakibatkan usahanya banyak yang berjalan di tempat bukan keuntungan yang dicapai tapi pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang dikejar, tidak memperhatikan manajemen usaha yang baik. Keadaan di atas menunjukkan bahwa para pengusaha industri kecil belum dapat menumbuh kembangkan Jiwa Wirausahanya dan



belum menerapkan manajemen usaha yang tepat adalah salah satu permasalahan yang perlu dipecahkan.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut salah satunya dengan memberikan pelatihan, namun demikian tidak semua pelatihan dapat menghasilkan yang terbaik apabila manajemen pelatihannya tidak terlaksana dengan baik. Jadi artinya untuk mencapai pelatihan yang efektif tidak akan terlepas dari manajemen pelatihannya yang baik atau dengan kata lain bahwa kaitan efektifitas pelatihan dengan manajemen itu sangat erat. Pelatihan tidak akan mencapai efektifitasnya apabila tidak melakukan kegiatan manajemen yang baik. Dengan demikian pelaksanaan pelatihan dalam pemberdayaan usaha industri kecil baru akan tercapai dengan baik apabila pelaksanaan pelatihannya menerapkan manajemen yang baik. Seperti dikemukakan oleh Sri Wahyudi dalam bukunya Manajemen Strategik (1995 : 19) mengemukakan sebagai berikut :

“Dengan menggunakan manajemen Strategik sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan ,maka para manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan.”

Jadi dengan menerapkan manajemen pada kegiatan pelatihan akan lebih menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan dan permasalahan yang menjadi resiko akan lebih kecil.

Pembangunan industri di Kabupaten Bogor, adalah bagian dari pembangunan industri Propinsi Jawa Barat bila dikembangkan akan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan Jawa Barat, namun dari sisi lain industri kecil di Kabupaten Bogor menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah. Permasalahan industri kecil di Kabupaten Bogor memiliki kesamaan dengan permasalahan Industri Kecil di daerah lainnya di Jawa Barat. Permasalahan utamanya yang dihadapi industri kecil adalah mengenai Sumber Daya Manusia, maka dalam memecahkan permasalahannya diperlukan pelatihan baik pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, maupun teknis lainnya yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan industri kecil termaksud. Semua itu tergantung kepada bagaimana manajemen pelatihan diterapkan.

Potensi industri di Kabupaten Bogor mencapai 10.300 unit usaha dari jumlah tersebut sebanyak 8.753 unit usaha adalah industri kecil, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 456.335 orang, namun keberadaan industri kecil di Kabupaten Bogor dibalik potensinya yang cukup banyak juga terdapat berbagai permasalahan yang dihadapinya, seperti lemahnya jiwa kewirausahaan dan lemahnya manajemen usaha, sehingga memerlukan pelatihan yang efektif, agar perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan.



Hasil survey pendahuluan kegiatan pelatihan terhadap industri kecil di Kabupaten Bogor yang dilaksanakan setiap tahun diantaranya pada tahun 2000 sebanyak 5 kali untuk 5 angkatan, yang diikuti oleh rata-rata 30 orang pengusaha setiap angkatan, sehingga jumlah peserta yang seharusnya mengikuti pelatihan selama tahun 2000 mencapai 150 orang peserta. Sehubungan dengan itu penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana kontribusi pelatihan yang diberikan untuk pemberdayaan para pengusaha industri kecil di Kabupaten Bogor.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kunci utama yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi industri kecil adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber daya manusianya dan salah satu jalan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Mengenai pelatihan yang efektif atau pencapaian sasaran pelatihan dapat dilihat dari pendapat yang kemukakan oleh Engkoswara dalam bukunya menuju Indoneisa Modern 2020 (1999: 110), bahwa :

“Latihan dimaksudkan untuk memperdalam dan memperkaya apa yang telah dinasihatkan atau diajarkan supaya peserta didik memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan seksama baik dalam tarap terampil maupun dalam tarap mahir atau ahli.”

Dengan demikian jelas penelitian mengenai manajemen pelatihan dalam pemberdayaan industri kecil di Kabupaten Bogor harus memiliki perencanaan yang baik. Sehubungan dengan itu alasan penulis memilih obyek penelitian sebagai berikut :

- a. Bogor sebagai Kota penyanggah DKI dan sebagai pintu pasar Jawa Barat untuk perdagangan produk industri baik secara nasional maupun internasional.
- b. Potensi industri Kabupaten Bogor terutama industri kecilnya yang layak untuk didorong ditumbuhkembangkan lebih dahulu dari kabupaten lainnya (dengan tidak mengenyampingkan daerah-daerah lainnya) karena akan lebih cepat untuk mendorong perekonomian kerakyatan di Jawa Barat.
- c. Berkembangnya industri kecil di Kabupaten Bogor akan memberikan dampak terhadap industri- industri kecil di kabupaten lainnya.

Dengan dipilihnya Kabupaten Bogor dijadikan obyek penelitian ini, memiliki harapan, terjadinya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil sebagai lokomotif pembangunan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat.

Produktivitas setelah mengikuti pelatihan merupakan harapan organisasi atau perusahaan secara umum. Terdapat hubungan yang erat antara produktivitas perorangan (*individual productivity*) dengan kinerja lembaga (*institutional productivity*) atau kinerja perusahaan (*corporate produktivity*). Dengan kata lain bahwa bila produktivitas karyawan baik, maka kemungkinan besar produktivitas perusahaan juga baik. Produktivitas seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji, dan mempunyai harapan (*expectation*) masa depan lebih baik (Prawirosentono, 1999:3).

Indikator produktivitas sangat erat dengan kualitas pencapaian suatu tujuan. Hal ini senada dengan pernyataan, bahwa: indikator produktivitas adalah pernyataan yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, yang menunjukkan kualitas atau mutu pencapaian tujuan (S.Pramutadi, 1995:6).

Produktivitas perusahaan yang telah mengikuti pelatihan usaha industri kecil (UIK) diharapkan memiliki peningkatan yang signifikan. Oleh karenanya untuk mengukur produktivitas tersebut dibuat model tersendiri yang dapat memberikan gambaran (informasi) yang lengkap tentang program pelatihan yang pernah dilaksanakan terutama dampaknya terhadap produktivitas usaha para pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan lainnya.

Kemudian juga bahwa pelatihan dapat meningkatkan pola sikap, pengetahuan, keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memadai (Westerman, 1997:90). Henry Simamora (1995: 286) yang menyoroti konsep pelatihan, bahwa pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman artinya perubahan sikap. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pada prinsipnya pelatihan dilaksanakan dalam mempersiapkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan pelatihan karyawan dibekali dengan keterampilan, pengetahuan dan perubahan sikap. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Randall (1997:323), yang mendefinisikan pelatihan sebagai

usaha organisasi yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekarang dan yang akan datang dengan meningkatkan kemampuan.

Pelatihan juga dikemukakan oleh William B. Scott (1962: 402-403), yaitu pelatihan dalam ilmu pengetahuan dan perilaku adalah suatu kegiatan lini dan staf yang tujuannya adalah mengembangkan pemimpin untuk memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar, hubungan dalam perseorangan dalam organisasi yang lebih baik dan penyesuaian pemimpin yang ditingkatkan pada suasana seluruh lingkungannya.

Umumnya tujuan pelatihan sumber daya manusia (SDM) adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja serta produktivitas para karyawan melalui proses belajar mengajar secara sistematis dan melalui waktu yang relatif cepat. Tujuan dari pelatihan yang dikemukakan oleh Randall (1997:325).

Menurut Simamora, Henry (1995:289) bahwa tujuan utama pelatihan ke dalam lima kelompok:

- 1) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi.
- 2) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan.
- 3) Membantu memecahkan permasalahan operasional.
- 4) Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
- 5) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.

Pelatihan merupakan alat manajemen yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi, seperti efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pelatihan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar kinerja individu dan organisasi meningkat. (Terence Jackson, 1998).

Ada beberapa keuntungan bagi perusahaan yang melaksanakan pelatihan bagi pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

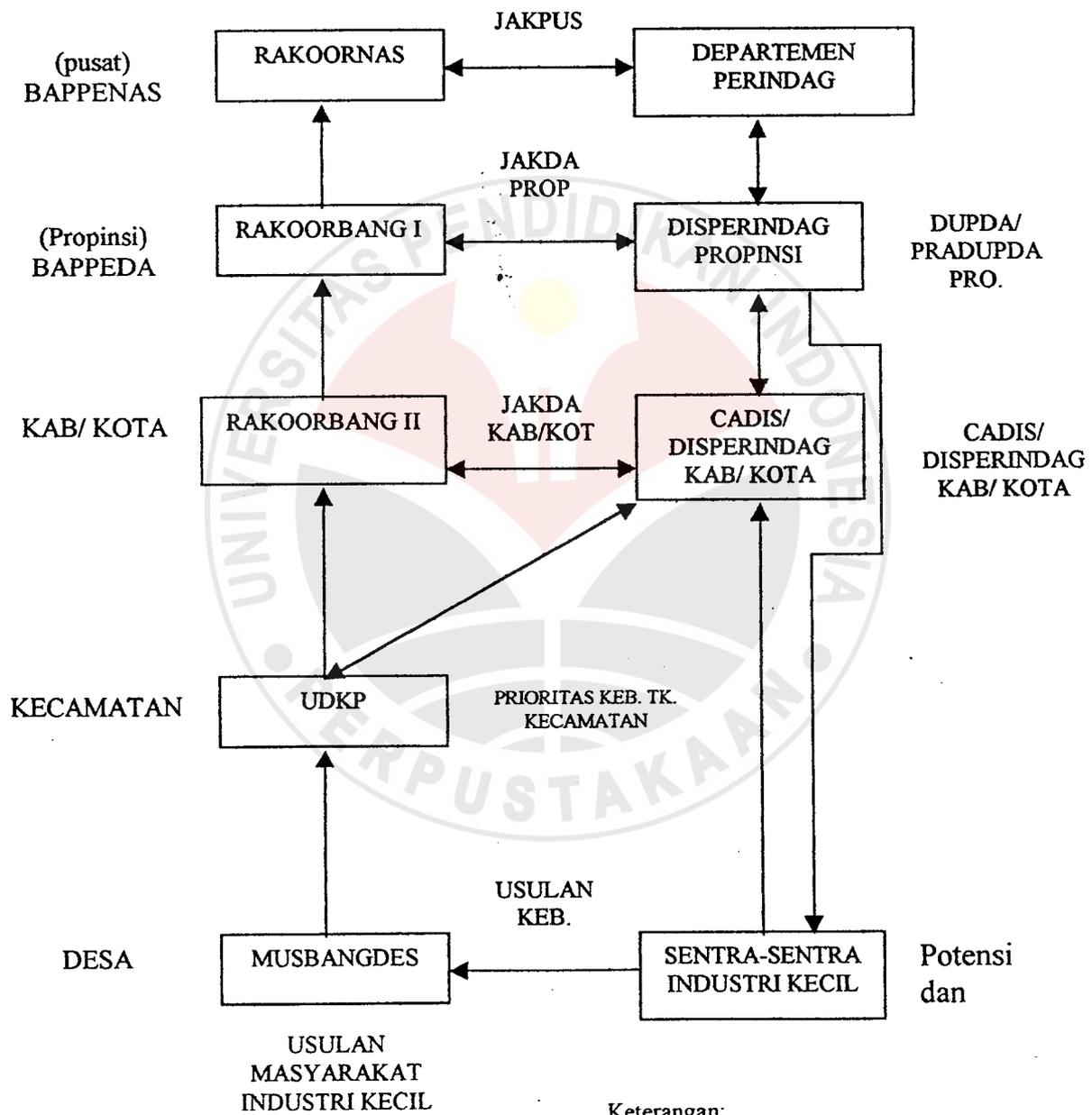
1. Membantu tenaga kerja baru dalam mempelajari tugas mereka secara lebih cepat dan efektif, meningkatkan pelaksanaan kerja tenaga kerja yang ada, meningkatkan volume kerja yang dicapai, menurunkan tingkat kesalahan kerja, menurunkan pelarian tenaga kerja, meningkatkan kepuasan kerja, penukaran keahlian yang telah usang dengan kecakapan baru, menurunkan tingkat kecelakaan, meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja, menyediakan kesempatan pengembangan karir dan meningkatkan citra perusahaan.
2. Membantu pelaksanaan perubahan. Keuntungan-keuntungan ini bahkan bisa jauh lebih penting, bukannya berkurang, jika organisasi terpengaruh oleh pembatasan anggaran yang ketat, dan pelatihan masih dapat diabsahkan sebagai investasi yang cukup baik.

(John & Poulina, 1997: 92-93).

Untuk kelancaran program pelatihan Dinas Perindustrian Kabupaten Bogor maka perlu adanya bentuk koordinasi yang memperlancar proses pelatihan. Sistem koordinasi yang dimaksud adalah bagaimana proposal/ usulan dapat menjadi program yang berbentuk proyek-proyek. Usulan

tersebut melalui sistem koordinasi dari Musyawarah Pembangunan Desa (MusBangDes) sampai dengan ketingkat Rakornas Tingkat Propinsi.

Terdapat dua sistem koordinasi untuk mencapai suatu program pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1
Koordinasi Bottom up Planning

Bagan di atas diketahui bahwa ada dua jenis sistem koordinasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian. Sistem koordinasi pertama *Bottom up planning* diawali dari Musyawarah Pembangunan Desa (MusBangDes). Musyawarah Pembangunan Desa (MusBangDes) inilah yang menampung semua aspirasi masyarakat pengusaha industri kecil untuk memberdayakan sekaligus mengembangkan keinginan mereka dengan potensi yang ada. Keterlibatan pemerintah desa dalam hal ini aparat desa dengan LKMD. Masyarakat pengusaha industri kecil yang menjadi sasaran pemberdayaan ikut terlibat dalam kontribusinya membuat usulan program. Usulan program MusBangDes tersebut diteruskan ke daerah Unit kerja pembangunan (UDKP) yang menampung usulan desa-desa untuk diteruskan ke Rakorbang tingkat II untuk dibahas dengan sektor-sektor di TK II (Kab/ Kota). Usulan ditampung dari berbagai kecamatan ini diteruskan untuk dibahas pada Rakorbang tingkat I bersama sektor-sektor di TK I. Hasil dari berbagai kecamatan ini akan menjadi bahasan kabupaten/ kota untuk membuat program pemberdayaan UIK dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek inilah yang menjadi timbal balik untuk kepentingan dan pemberdayaan UIK.

Adapun pada bagan kedua menjelaskan bahwa hasil survey lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengajukan proposal pra DUPDA/ DUPDA. Usulan atau proposal inilah ditindaklanjuti ke bupati untuk

diteliti. Bila proposal tersebut diterima, maka selanjutnya diajukan ke tingkat Dewan. Dewan bersama-sama bupati membuat program yang sesuai dengan kemauan dan keinginan pengusaha industri kecil. Program-program yang dihasilkan oleh Dewan dan Bupati berbentuk proyek-proyek pemberdayaan usaha industri kecil (UIK).

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian adalah termasuk langkah yang penting akan dapat memperjelas dalam menentukan apa yang akan diteliti dan untuk apa penelitian dilakukan, dari mana akan dimulai, manfaat apa yang akan diperoleh dan untuk siapa hasilnya. Untuk itu masalah yang akan dirumuskan harus menarik bagi peneliti, harus merupakan kebutuhan peneliti untuk memecahkannya, karena apabila tidak maka akan dapat mengakibatkan ketidakseriusan bagi sipenelitinya, yang akhirnya dapat menimbulkan kegagalan dalam penelitian.

Seperti Arikunto dalam bukunya *Prosedur penelitian* suatu pendekatan praktek (1998: 19), mengemukakan :

“Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan/studi Eksploratoris, maka masalah yang diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus dimulai, ke mana harus pergi dan dengan apa”.

Selanjutnya Best yang disunting oleh Faisal dan Waseso dalam Metodologi Penelitian Pendidikan (1982: 61) mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam usulan penelitian, perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Penegasan tersebut, bisa berbentuk pertanyaan, juga bisa berbentuk pernyataan deklaratif. Penegasan masalah tersebut sekaligus menggambarkan fokus arah yang diikuti nantinya di dalam proses suatu penelitian. Rumusan masalah haruslah cukup terbatas lingkungannya, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang tegas, kalau toh disertai rumusan masalah yang masih bersifat umum, hendaknya disertai dengan penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional”.

Dengan demikian dalam merumuskan masalah penelitian adalah penting, karena akan menentukan terlaksananya penelitian yang diharapkan serta akan menentukan ketercapaian manfaat hasil penelitian. Sehubungan dengan itu untuk merumuskan permasalahan penelitian terhadap manajemen pelatihan dalam pemberdayaan industri kecil di Kabupaten Bogor, maka perlu difahami sebelumnya mengenai permasalahan yang dihadapi industri kecil. Permasalahan industri kecil pada umumnya tidak jauh berbeda secara nasional termasuk di Kabupaten Bogor, yaitu lemahnya dalam penerapan manajemen usaha, keterampilan yang dimiliki masih tradisional, teknologi yang digunakan pada umumnya sangat sederhana, sehingga berakibat pada kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, belum tumbuhnya jiwa wirausaha yang diharapkan, terbatasnya permodalan yang dimiliki, sifat usaha yang bertahan pada sifat usaha yang turun temurun dan

ikut ikutan. Disamping itu latar belakang pendidikan formal yang pada umumnya rendah, sehingga mengakibatkan lambat untuk menerima pembaharuan-pembaharuan. Dan permasalahan tersebut masih terwaris oleh para pengusaha industri kecil pada umumnya sampai sekarang. Keadaan di atas, kesemuanya adalah bersumber dari kemampuan sumber daya manusianya sebagai pelaku ekonomi di sektor industri sub sektor industri kecil, karenanya agar industri kecil dapat berdaya guna sesuai dengan yang diharapkan diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya, dan diperlukan pelatihan - pelatihan yang efektif.

Seperti pendapat ke dua ahli di atas, bahwa dalam merumuskan masalah yang akan diteliti penegasannya dapat berbentuk pertanyaan atau dapat pula berbentuk pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut pada perumusan masalah ini akan ditegaskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran umum penyelenggaraan pelatihan Usaha Industri Kecil (UIK), menyangkut kurikulum (materi), penyelenggara, sarana & prasarana, tenaga Pelatih dan peserta pelatihan ?
2. Bagaimanakah tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan pelatihan UIK ?
3. Bagaimanakah faktor kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang serta analisisnya terhadap pelatihan Usaha Industri Kecil (UIK) ?

C. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelatihan usaha industri kecil memberikan dampak terhadap pengembangan usaha industri kecil di Kabupaten Bogor, untuk mengetahui ini tentunya perlu didukung oleh data dan fakta empirik yang akurat dan aktual, sehingga dapat terlihat dan diketahui secara objektif.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah menjabarkan tujuan umum tersebut, yaitu :

1. Mengetahui gambaran umum penyelenggaraan pelatihan Usaha Industri Kecil (UIK) yang menyangkut kurikulum (materi), penyelenggara, sarana prasarana, tenaga pelatih dan peserta pelatihan.
2. Mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan pelatihan UIK.
3. Mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang terhadap pelatihan Usaha Industri Kecil (UIK).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang berjudul “Manajemen Pelatihan dalam Pemberdayaan Usaha Industri Kecil di Kabupaten Bogor”, sebagai berikut :



1. Kepentingan Akademis:

- a. Hasil penelitian dapat digunakan bahan kajian lebih lanjut yang lebih spesifik.
- b. Memberikan sumbangan dalam memperkaya perpustakaan UPI Bandung.
- c. Memperkaya bahan informasi pembangunan khususnya industri kecil di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat umumnya, yang dapat dijadikan wahana dalam pembahasan ilmiah.
- d. Bahan pengambilan keputusan dalam meningkatkan pembangunan industri melalui peningkatan kinerja pelatihan usaha industri kecil.

2. Kepentingan Pemerintah.

- a. Dapat dijadikan bahan kebijaksanaan dalam pengembangan industri kecil di Kabupaten Bogor, sebagai kontribusi dari UPI Bandung.
- b. Dapat dijadikan bahan perbaikan atau penyempurnaan serta acuan dalam pelaksanaan pelatihan oleh Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Bogor.

E. Kerangka Berpikir

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, antara lain diarahkan pada pemberdayaan industri kecil, hal ini apabila dikaitkan dengan potensi yang ada sangat tepat, mengingat dilihat dari

penyerapan tenaga kerja, penyebarannya serta kepemilikannya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Namun dalam pembangunan industri kecil tidak semudah apa yang bayangkan, karena dalam pembangunan industri kecil terdapat beberapa aspek yang berpengaruh yang perlu mendapat perhatian selain potensi juga permasalahannya yang tidak mudah untuk dipecahkan, karena itu dalam pembangunan industri kecil selain memperhatikan potensi, juga harus memperhatikan permasalahannya untuk dipecahkan, agar industri kecil dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberikan sumbangan yang berarti dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Industri kecil dalam keberadaannya dilihat secara kuantitatif cukup potensial, akan tetapi secara kualitatif sepertinya belum mencapai harapan keadaan tersebut kemungkinan disebabkan dengan adanya permasalahan yang dihadapi industri kecil sulit dipecahkan sendiri, sehingga memerlukan pembinaan dari pihak pemerintah.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa titik pusat (centre point) dari pembinaan yang dapat mendorong tercapainya pembangunan industri kecil adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui pelatihan dan itu akan tergantung pada penerapan manajemen pelatihannya dalam memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambatnya serta memperhatikan faktor lingkungannya, karena faktor-

faktor termaksud akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelatihan.

Dalam hal inipun kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan bantuan seperti tersebut di atas, telah dilakukan selain bantuan fasilitas produksi juga meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusianya.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan cerdas diperlukan peningkatan perekonomian melalui pembangunan di berbagai sektor diantaranya adalah sektor industri. Untuk itu Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (1999: 17) telah memberikan arah kebijakannya sebagai berikut :

“Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, petambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.”

Dari Garis-Garis Besar Haluan Negara di atas, telah menampakkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah dalam mewujudkan perekonomian rakyat

diantaranya adalah melakukan pembangunan industri khususnya industri kecil.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektor pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim usaha yang didorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan pengembangan desa swadaya dan desa swakarsa menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan serta dalam pengembangan ekonomi rakyat dan makin meningkatkan swadaya masyarakat pedesaan dalam pembangunan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Pada prakteknya, peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan. Artinya, bahwa pembangunan hanya akan terlaksana bila dilakukan melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya masing-masing.

Sebagai pelaku pembangunan pengusaha industri kecil merupakan potensi strategis untuk terlibat langsung secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama bila dilakukan dengan kondisi objektif masyarakat pedesaan di Jawa Barat yang memiliki tingkat agrarisitas yang cukup tinggi. Sehingga keterlibatan pengusaha kecil sebagai minoritas memiliki arti penting dalam ikut memotivasi masyarakat sekaligus melakukan upaya nyata dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam pembangunan bidang penataan ekonomi dan kesehatan lingkungan ini menjadi prioritas penting karena lingkungan banyak menentukan tingkat kesejahteraan.

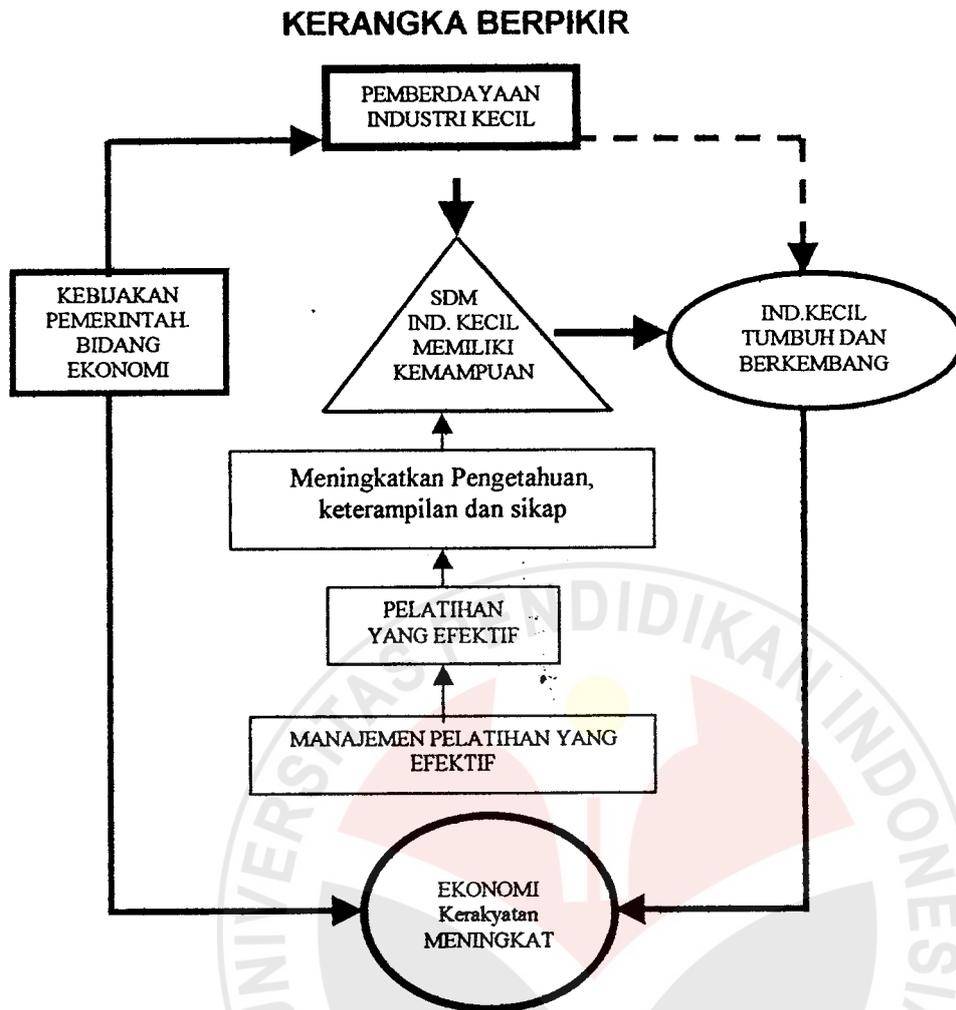
Atas dasar pertimbangan itulah, pembangunan masyarakat desa akan dilaksanakan dengan melibatkan pengusaha industri kecil melalui kegiatan pelatihan yang dilandasi oleh manajemen, maka diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan usaha industri kecil dalam rangka upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi yang keberpihakan pada rakyat dapat segera terwujud. Keadaan tersebut tentunya perlu dukungan pemerintah dan agar dukungan pemerintah dapat dilaksanakan, maka harus dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah, undang-undang yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Peraturan-Peraturan yang lebih kongkrit lainnya.

Suatu pelatihan yang dilandasi oleh penerapan manajemen yang baik, berarti pelaksanaan pelatihan akan menerapkan fungsi-fungsi dari pada manajemen, sedangkan fungsi - fungsi manajemen yang dikemukakan

oleh para ahli adalah yang pertama dikemukakan adalah fungsi perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dalam setiap kegiatan adalah sangat penting, dengan pengertian tidak mengecilkan arti dari pada fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti pengorganissian, pengawasan dan pengendalian termasuk buggeting atau pembiayaan. Karena fungsi - fungsi manajemen ini adalah sebagai sub sistem dari pada manajemen.

Untuk itu semua tentunya tidak mungkin dapat terlaksana dan dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan pemerintah daerah, dan dukungan pemerintah akan menjadi suatu kekuatan bagi pelaksana teknis seperti Cabang Dinas Perindustrian, untuk dijadikan suatu pegangan formal, apabila dukungan itu dituangkan dalam kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten. Seperti dituangkan dalam RUPTD (Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah).

Gambaran mengenai kerangka berpikir Manajemen Pelatihan dalam upaya pemberdayaan industri kecil di Kabupaten Bogor adalah:



Gambar 2 Paradigma Penelitian

Kerangka berpikir di atas, menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan, diantaranya melalui pemberdayaan industri kecil. Dengan pemberdayaan industri kecil, maka ekonomi kerakyatan akan tercapai. Hal ini mengingat industri kecil adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan langsung oleh masyarakat terutama di pedesaan dengan kata lain industri kecil adalah sudah merupakan sumber

28

penghasilan pokok masyarakat terutama di pedesaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik hasilnya maupun produknya, lebih jauh dilihat dari perkembangannya industri kecil termaksud sudah banyak melakukan eksport walaupun dilakukan secara tidak langsung.

Akan tetapi dibalik potensinya yang cukup besar dan didukung oleh faktor-faktor penunjangnya baik bahan baku maupun peralatannya. Industri kecil menghadapi permasalahan baik dalam lingkungan intern antara lain sumber daya manusia, permodalan, dan teknologi, sedangkan lingkungan ekstern seperti sumber bahan baku, pemasaran, dan beberapa kebijakan yang kurang mendorong perkembangan usahanya. Permasalahan termaksud tentunya tidak akan dapat dipecahkan sendiri oleh para pengusaha industri kecil, akan tetapi diperlukan bantuan pemerintah. Namun apabila memperhatikan latar belakang pendidikan dan sifat usaha yang pada umumnya turun temurun, nampaknya salah satu permasalahan industri kecil yang dominan adalah kemampuan sumber daya manusianya yang relatif rendah, dengan demikian prioritas pemecahan permasalahan industri kecil adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

Sehubungan dengan itu suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri kecil diantaranya dengan melaksanakan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis (manajerial), namun demikian pelatihan itu sendiri baru akan mencapai sarasanya sesuai dengan harapan tergantung pada penerapan manajemen

pelatihannya dalam arti manajemen pelatihan yang memperhatikan fungsi-fungsi manajemennya.

Upaya untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan pengusaha industri kecil belum mendapatkan perhatian yang intensif. Sehingga kemajuan dan perkembangannya belum mendapatkan angka yang pasti, apakah sebelum dan sesudah pelatihan mengalami perubahan. Padahal dalam pelaksanaan pelatihan perlu adanya evaluasi. Menurut Nanang Fattah (1999:108), tujuan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan adalah:

- 1) untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan awal dan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- 2) Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia, sarana, prasarana, dan biaya) secara efisien dan ekonomis.
- 3) Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu misalnya program tahunan, kemajuan belajar.

Untuk melihat keberhasilan dari suatu evaluasi dapat dilihat dari input, proses, dan output, serta outcome, dari pelatihan yang dilaksanakan. Keberhasilan pelatihan UIK dapat dilihat dengan melakukan evaluasi.

Karena sasaran evaluasi menurut Prasetya Irawan (1995: 7-8), adalah:

Input meliputi: 1) peserta pelatihan; 2) materi; 3) sarana pelatihan; 4) kurikulum; 6) strategi pelatihan; 7) biaya. Komponen proses yaitu meliputi: 1) strategi pelatihan; 2) media instruksional; 3) cara mengajar pelatihan; 4) cara belajar peserta pelatihan; 5) biaya. Komponen out put meliputi: 1) lulusan pelatihan. Komponen outcome, yaitu: 1) tingkat produktivitas; 2) sistem manajemen; dan 3) loyalitas pegawai.

Jelasnya dari Kerangka berpikir di atas, menggambarkan bahwa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan di dalam GBHN, salah satunya upaya pemberdayaan industri kecil di daerah dengan meningkatkan kemampuan untuk berdaya saing dipasaran yang didukung oleh sumber daya manusia industri yang terampil baik secara teknis maupun non teknis. Untuk itu kuncinya adalah diperlukan pelatihan yang menggunakan manajemen diantaranya menyusun perencanaan pelatihan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Seperti dikemukakan oleh Kristiadi Dimensi praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia (1997: 19), sebagai berikut :

“Menerapkan manajemen modern dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini terdapat tiga fungsi pokok dalam manajemen modern tersebut yaitu: pertama, perencanaan yang matang; kedua, pelaksanaan yang tepat; dan ketiga, pengawasan yang ketat.”

Ketiga hal dalam manajemen modern di atas adalah penting, dari ketiga fungsi tersebut untuk menentukan pelaksanaan tepat dan pengawasan yang ketat itu dasar utamanya adalah perencanaan yang matang. Karena itu untuk dijadikan prioritas penelitian dalam pemberdayaan industri kecil di Kabupaten Bogor dititikberatkan pada manajemen pelatihannya.

Mengenai kerangka berpikir di atas, ringkasnya adalah apabila pelatihan industri kecil dilakukan dengan manajemen yang tepat, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang

dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan potensi yang tersedia secara efektif dan efisien. Dengan berkembangnya usaha industri kecil akan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang memiliki daya saing dipasaran, memberikan pendapatan bagi pengusahanya, pekerjanya, dan masyarakat di sekitarnya dengan demikian pemberdayaan industri kecil diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan yang merata dari pedesaan sampai ke perkotaan.



